

# COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KAMPUNG NAMATOTA KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT

Asry Meylinda Laway  
NPP. 32.1066

Asdaf Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat  
Program Studi Studi Kebijakan Publik  
Email: [32.1100@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.1100@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Merintha Suryapuspita, S.AP., M.KP

## ABSTRACT

**Problem Statement:** This study is motivated by the importance of synergy among the government, community, and non-governmental actors in the development of community-based tourism. Kampung Namatota in Kaimana Regency is one of the tourist villages with great potential in terms of natural and cultural aspects, but its implementation faces various collaborative challenges. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze how collaborative governance is applied in the development of tourism in Kampung Namatota, focusing on the actors involved, the collaboration process, as well as the supporting and inhibiting factors encountered. **Method:** *This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation and documentation, without direct interviews. Data analysis is conducted thematically based on the collaborative governance theory by Ansell and Gash (2008), which includes four main elements: face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, and shared understanding. This method allows detailed understanding of the forms of cooperation, actors' roles, and dynamics that occur. Informants were purposively selected based on their direct involvement, including village officials, Tourism Office, community leaders, customary institutions, and NGOs to obtain relevant and representative data from various perspectives. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies, then analyzed using the interactive model of Miles and Huberman with triangulation to ensure data validity and reliability. This study aims to provide a factual and applicable overview of collaborative governance practices as well as supporting and inhibiting factors in community-based tourism development at the site.* **Result:** The results show that the implementation of collaborative governance in Kampung Namatota involves the Kaimana Regency Government, Tourism Office, Sinara NGO, village officials, and local communities. Trust among parties and the active role of Sinara NGO in strengthening community capacity are the main factors supporting the success of the collaboration. **Conclusion:** The application of collaborative governance in tourism development in Kampung Namatota runs participatively by involving various actors, including the Kaimana Regency Government, Tourism Office, Sinara NGO, village officials, and local communities. The main factors supporting the success of this collaboration are the trust built among parties and the active role of Sinara NGO in enhancing community capacity. However, the sustainability of this collaboration requires strong commitment from all parties and continuous cultivation of shared understanding to ensure that community-based tourism development in Kampung Namatota can be effective and sustainable.

**Keywords:** Collaborative Governance, Tourism, Participation.

## ABSTRAK

**Permasalahan:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor non-pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas. Kampung Namatota di Kabupaten Kaimana merupakan salah satu kampung wisata yang memiliki potensi besar dari aspek alam dan budaya, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan kolaboratif.

**Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana collaborative governance diterapkan dalam pengembangan pariwisata di Kampung Namatota, dengan fokus pada aktor yang terlibat, proses kolaborasi, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi.

**Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi, tanpa melibatkan wawancara langsung. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat elemen utama: dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama. Metode ini memungkinkan pemahaman detail tentang bentuk kerja sama, peran aktor, serta dinamika yang terjadi. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung mereka, meliputi aparat kampung, Dinas Pariwisata, tokoh masyarakat, lembaga adat, dan LSM, guna memperoleh data yang relevan dan representatif dari berbagai perspektif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi untuk menjamin validitas dan reliabilitas informasi. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran faktual dan aplikatif mengenai praktik collaborative governance serta faktor pendukung dan hambatan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di lokasi tersebut.

**Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance di Kampung Namatota melibatkan Pemerintah Kabupaten Kaimana, Dinas Pariwisata, LSM Sinara, aparat kampung, dan masyarakat lokal. Kepercayaan antarpihak dan peran aktif LSM Sinara dalam penguatan kapasitas masyarakat menjadi faktor utama pendukung keberhasilan kolaborasi.

**Kesimpulan:** Penerapan collaborative governance dalam pengembangan pariwisata di Kampung Namatota berjalan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai aktor, termasuk Pemerintah Kabupaten Kaimana, Dinas Pariwisata, LSM Sinara, aparat kampung, dan masyarakat lokal. Faktor utama yang mendukung keberhasilan kolaborasi ini adalah adanya kepercayaan yang terbangun antar pihak serta peran aktif LSM Sinara dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Meskipun demikian, keberlanjutan kolaborasi ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak dan pemahaman bersama yang terus dipupuk agar pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Kampung Namatota dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Collaborative Governance*, Pariwisata, Partisipasi.



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pengembangan sektor pariwisata saat ini memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Collaborative Governance, sebagaimana dijelaskan oleh Ansell dan Gash (2008), merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menangani isu publik secara inklusif dan konsensus-oriented. Pendekatan ini sejalan dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan. Dalam konteks ini, kolaborasi tidak hanya dimaknai sebagai kerja sama administratif, melainkan sebagai dinamika interaktif yang menciptakan nilai bersama melalui proses dialogis, seperti yang ditekankan oleh Emerson et al. (2012) dalam kerangka kerja integratif mereka. Kolaborasi yang efektif membutuhkan pemahaman konteks sosial, ekonomi, dan institusional yang melingkupi suatu wilayah, serta adanya kepercayaan antaraktor (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012).

Sektor pariwisata di Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan peningkatan pendapatan daerah. Namun, akibat pandemi, pendapatan menurun drastis dan baru mulai pulih pada 2022 dengan capaian USD 7,03 miliar (Statista, 2023). Kondisi ini menegaskan perlunya strategi pengelolaan pariwisata yang adaptif dan kolaboratif.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar namun menghadapi berbagai tantangan adalah Kampung Namatota, Distrik Kaimana, Papua Barat. Daya tarik seperti interaksi dengan lumba-lumba dan hiu paus, tradisi adat *Sasi Nggama*, serta lanskap alam seperti Danau Ubur-Ubur dan Pantai Sagnus Morait menjadi aset penting. Namun, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas SDM lokal, minimnya promosi, serta faktor geografis dan cuaca ekstrem menjadi hambatan utama.

Pengalaman kolaboratif dalam perencanaan wisata komunitas lokal telah banyak dikaji, misalnya oleh Jamal & Getz (1995), yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam merancang dan mengelola destinasi wisata berbasis komunitas. Demikian pula, Aas et al. (2005) dalam studi mereka di Laos menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelestarian warisan budaya yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata. Lebih lanjut, Bramwell & Sharman (1999) mengajukan model evaluatif untuk menilai apakah kolaborasi lokal telah menciptakan pembelajaran kolektif dan konsensus yang menyeluruh, serta mengurangi ketimpangan kekuasaan antar pemangku kepentingan. Pendekatan ini sangat relevan diterapkan di Namatota, di mana keterlibatan lokal sering kali masih bersifat marginal. Selain itu, pengelolaan kolaboratif juga harus memperhatikan dinamika kontrol dan kepercayaan, sebagaimana diuraikan oleh Sundaramurthy & Lewis (2003). Terlalu dominannya kontrol dapat menghambat inovasi dan komitmen stakeholder, sedangkan kolaborasi yang terlalu longgar bisa berujung pada konflik kepentingan.

Dalam konteks inovasi dan daya saing pariwisata lokal, studi Novelli et al. (2006) menunjukkan bahwa pengembangan *cluster* dan *networking* antar pelaku usaha kecil di sektor pariwisata dapat meningkatkan kapabilitas inovatif mereka. Namun, hal ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan peran aktif dari semua pemangku kepentingan. Model pengelolaan berbasis orientasi pemangku kepentingan seperti diusulkan oleh Sautter & Leisen (1999) juga dapat diterapkan untuk menyelaraskan tujuan antar aktor yang memiliki orientasi relasional dan transaksional yang berbeda dalam proses perencanaan pariwisata. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip Collaborative Governance dan memperhatikan hasil-hasil penelitian terdahulu, pengembangan wisata di Kampung Namatota dapat diarahkan menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan lokal. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat identitas budaya masyarakat adat, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam tata kelola destinasi wisata dan pelayanan publik, masih terdapat sejumlah kesenjangan antara konsep ideal collaborative governance dengan realitas implementatif di lapangan, khususnya di konteks lokal dan wilayah berkembang. Pertama, studi **Nurnawati et al. (2024)** mengindikasikan bahwa Mal Pelayanan Publik di Banda Aceh telah menerapkan model kolaborasi lintas sektor, namun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi serta infrastruktur pendukung. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara idealisme collaborative governance—yang mengedepankan sinergi lintas sektor berbasis teknologi—dengan kondisi faktual berupa keterbatasan kapasitas dan sumber daya. Kedua, sebagian besar penelitian terdahulu yang berfokus pada kolaborasi dalam sektor pariwisata (Jamal & Stronza, 2009; Wondirad et al., 2020; Okazaki, 2008) menekankan aspek teori dan struktur kolaborasi, namun belum secara menyeluruh mengulas bagaimana dinamika kekuasaan, peran teknologi digital, dan dukungan institusional lokal saling memengaruhi efektivitas kolaborasi. Padahal, dalam praktiknya, interaksi kekuasaan (Reed, 1997) dan keterbukaan data digital (Jovicic, 2019) sangat menentukan keberhasilan partisipasi masyarakat dalam perencanaan wisata yang berkelanjutan. Ketiga, walaupun peran *Destination Management Organizations* (DMOs) sebagai katalisator kolaborasi telah banyak diulas (Volgger & Pechlaner, 2014; Komppula, 2014), studi mengenai kontekstualisasi peran DMO dalam ekosistem destinasi wisata di kawasan berkembang atau kota kecil yang tidak memiliki struktur DMO formal masih minim. Di sinilah muncul kebutuhan akan penelitian yang mengidentifikasi bentuk-bentuk alternatif dari DMO berbasis kolaborasi informal atau hybrid governance yang berperan secara de facto di tingkat lokal. Dengan kata lain, terdapat gap antara banyaknya konsep teoretis kolaborasi (yang ideal dan terstruktur) dan minimnya studi empiris tentang bagaimana kolaborasi terjadi secara adaptif dan kontekstual di daerah dengan kapasitas terbatas, baik dalam layanan publik maupun pariwisata.

## 1.3. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengulas pentingnya pendekatan kolaboratif dalam tata kelola destinasi dan layanan publik. **Nurnawati et al. (2024)** mengkaji pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam konteks Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Banda Aceh. Studi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara instansi pemerintah, dukungan teknologi, serta kontribusi lintas sektor. Meskipun secara umum kolaborasi dalam penerapan MPP dianggap cukup baik, tantangan seperti keterbatasan SDM teknologi informasi dan infrastruktur tetap menjadi kendala yang perlu diperbaiki untuk optimalisasi layanan. Dalam konteks konservasi dan pariwisata berbasis kawasan lindung, Jamal dan Stronza (2009) menekankan kompleksitas struktur kolaborasi yang melibatkan masyarakat lokal, sistem pemerintahan taman nasional, serta hubungan lokal-global dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Studi mereka di Bolivia memperlihatkan dinamika evolusi kemitraan antara aktor lokal dan internasional serta pentingnya integrasi pengetahuan lokal dan ilmiah. Sementara itu, Okazaki (2008) mengembangkan model *Community-Based Tourism* (CBT) yang menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata. Studi kasus di Filipina menunjukkan pentingnya pengukuran tingkat partisipasi dan redistribusi kekuasaan sebagai bagian dari upaya kolaboratif yang nyata. Namun, seperti yang ditunjukkan Reed (1997), tidak semua upaya kolaboratif bebas dari ketimpangan. Dalam kajiannya tentang perencanaan pariwisata komunitas di Kanada, ia menggarisbawahi bahwa relasi kekuasaan yang timpang seringkali menghambat upaya kolaboratif, dan mekanisme penyeimbang kekuasaan jarang efektif dalam konteks pariwisata yang baru tumbuh.

Fenomena pandemi juga menjadi titik reflektif penting bagi dunia pariwisata. Jamal dan Budke (2020) menyarankan adanya tanggung jawab bersama antara aktor lokal dan global dalam membangun kembali pariwisata yang tangguh dan beretika di tengah dan pasca-pandemi global. Dalam upaya



meningkatkan daya saing destinasi pedesaan, Komppula (2014) menyoroti peran vital wirausahawan lokal. Studi kasus di Finlandia menunjukkan bahwa tanpa inovasi dan kolaborasi antarpelaku usaha kecil, pengembangan destinasi akan stagnan meskipun dukungan pemerintah ada.

Jovicic (2019) menawarkan perspektif transformasional melalui konsep *smart tourism destinations*, yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dan mendukung inovasi berkelanjutan. Wondirad et al. (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan ekowisata di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan. Studi di Ethiopia mengungkapkan bahwa buruknya komunikasi dan minimnya partisipasi komunitas lokal berakibat pada kegagalan konservasi dan ketimpangan manfaat ekowisata. Pada ranah warisan budaya, Landorf (2009) menekankan perlunya perencanaan jangka panjang dan partisipatif dalam pengelolaan situs warisan dunia. Meskipun sudah ada struktur perencanaan formal di enam situs yang diteliti, masih ditemukan keterbatasan dalam pelibatan masyarakat lokal secara bermakna. Palmer dan Bejou (1995) menganalisis aliansi pemasaran destinasi wisata dan menemukan bahwa pembentukan aliansi sangat bergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan politik setempat. Oleh karena itu, strategi kolaboratif perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan batasan yang dihadapi para pemangku kepentingan. Akhirnya, Volgger dan Pechlaner (2014) menyoroti pentingnya *Destination Management Organizations* (DMOs) sebagai fasilitator jejaring kolaboratif. Keberhasilan DMO dalam meningkatkan daya saing destinasi berkorelasi kuat dengan kemampuan mereka dalam membangun otoritas dan kepercayaan melalui hubungan kolaboratif yang efektif.

#### 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah melalui pendekatan lintas sektor yang mengkaji praktik *collaborative governance* tidak hanya dalam konteks pariwisata berbasis komunitas sebagaimana banyak diteliti sebelumnya, tetapi juga dalam tata kelola layanan publik, khususnya Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah berkembang. Sebagian besar studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Okazaki (2008), Reed (1997), dan Jamal & Stronza (2009), memfokuskan diri pada kolaborasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Mereka menekankan pentingnya partisipasi komunitas, relasi kekuasaan, dan struktur kolaboratif dalam mencapai keberhasilan proyek pariwisata, tetapi tidak mengaitkannya secara langsung dengan dinamika tata kelola layanan publik di sektor pemerintahan. Sementara itu, studi oleh Nurnawati et al. (2024) mengenai MPP di Banda Aceh memberikan kontribusi penting dalam mengungkap bagaimana kolaborasi antara institusi pemerintah, sektor teknologi informasi, dan aktor lokal terjadi dalam pelayanan publik. Namun, penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan terbatas pada satu kasus, tanpa mengintegrasikan pendekatan teoretis yang lebih luas mengenai kolaborasi multi-stakeholder seperti yang dibahas dalam pariwisata oleh Jamal & Budke (2020) atau Wondirad et al. (2020). Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui tiga kontribusi utama. Pertama, penelitian ini menggabungkan dua ranah yang selama ini dikaji secara terpisah, yakni kolaborasi dalam tata kelola destinasi wisata dan dalam layanan publik, untuk melihat pola kolaborasi yang bersifat lintas sektor dan lintas institusi. Dengan membandingkan konteks pariwisata (seperti dalam studi Komppula, 2014; Volgger & Pechlaner, 2014) dan konteks pelayanan publik (Nurnawati et al., 2024), ditemukan bahwa kolaborasi yang efektif tidak hanya ditentukan oleh struktur formal atau keberadaan DMO, tetapi juga oleh adaptabilitas pemerintah lokal terhadap teknologi dan dinamika sosial. Kedua, studi ini menonjolkan peran teknologi digital sebagai penopang utama efektivitas kolaborasi, sebagaimana ditegaskan dalam literatur smart tourism (Jovicic, 2019), namun mengkritisi bahwa tanpa kesiapan SDM dan infrastruktur, keunggulan teknologi tidak serta merta menghasilkan kolaborasi yang optimal. Ini menjadi pembeda dari literatur sebelumnya yang cenderung meromantisasi potensi teknologi dalam tata kelola destinasi. Ketiga, penelitian ini mengangkat isu kesenjangan kekuasaan dan partisipasi, seperti yang digarisbawahi oleh Reed (1997), namun dengan pendekatan yang

lebih operasional—yakni dengan melihat bagaimana peran otoritas lokal, pelaku swasta, dan komunitas saling bernegosiasi dalam praktik kolaboratif. Dalam hal ini, kontribusi penelitian ini adalah pada penyusunan kerangka konseptual yang menyeimbangkan antara pendekatan struktural (institusi dan kebijakan) dan pendekatan dinamis (interaksi, relasi kuasa, dan adaptasi lokal). Dengan demikian, kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk mengisi kekosongan kajian lintas sektor dalam collaborative governance, memperluas pemahaman mengenai implementasi kolaborasi pada konteks dengan keterbatasan kapasitas, serta menawarkan pendekatan integratif yang mengaitkan teori, teknologi, dan praktik lokal secara langsung.

### **1.5. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana collaborative governance diterapkan dalam pengembangan pariwisata di Kampung Namatota Provinsi Papua Barat, dengan fokus pada aktor yang terlibat, proses kolaborasi, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, termasuk proses kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis dan faktual mengenai bentuk-bentuk kerja sama, interaksi, serta peran masing-masing aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kampung Namatota. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami dinamika pelaksanaan *collaborative governance*, termasuk faktor pendukung, hambatan, dan strategi yang dijalankan oleh para pemangku kepentingan. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Namatota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa Kampung Namatota merupakan salah satu wilayah yang aktif mendorong pengembangan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat dan kerja sama multiaktor. Kampung ini menjadi contoh nyata dari penerapan prinsip collaborative governance di daerah pesisir Papua Barat, di mana keterlibatan pemerintah, masyarakat lokal, lembaga adat, dan organisasi non-pemerintah berjalan secara dinamis dalam proses pembangunan sektor pariwisata. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu individu yang dipilih berdasarkan keterlibatannya langsung dalam proses pengembangan pariwisata dan kolaborasi antar lembaga. Informan utama terdiri dari aparat Kampung Namatota, perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Kaimana, tokoh masyarakat, pengelola wisata lokal, lembaga adat kampung, serta perwakilan LSM yang aktif dalam pengembangan kawasan pariwisata berbasis masyarakat. Penentuan jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan data dan prinsip saturasi informasi, yaitu penghentian pengumpulan data saat informasi yang diperoleh dianggap cukup dan tidak ada temuan baru yang signifikan.

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci untuk menggali pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk kolaborasi, peran masing-masing aktor, pola komunikasi, serta kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan pariwisata. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pariwisata maupun interaksi antar pemangku kepentingan di Kampung Namatota. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi seperti Rencana Pembangunan Kampung, notulensi rapat, berita acara musyawarah, laporan kegiatan, serta bahan publikasi lainnya yang mendukung data primer (Nurdin & Hartati, 2019:173). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data



dilakukan dengan memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah ke dalam informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, penyajian data dilakukan melalui penyusunan narasi, matriks, dan kutipan informatif guna mempermudah dalam melihat pola, hubungan, dan dinamika kolaborasi antar aktor. Terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan merumuskan temuan utama berdasarkan hasil interpretasi data yang telah diverifikasi melalui pengecekan silang antar informan dan teknik triangulasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang memiliki perspektif dan posisi berbeda dalam struktur kolaborasi. Triangulasi teknik dilakukan dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk mengecek stabilitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh (Simangunsong, 2017:230). Dengan pendekatan dan metode yang digunakan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan mendalam mengenai praktik collaborative governance dalam pengembangan pariwisata di Kampung Namatota, serta menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk penguatan kolaborasi lintas aktor di sektor pariwisata daerah. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 minggu di awal Bulan Januari Tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana Papua Barat, alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana, Papua Barat, untuk memperoleh data terkait pengembangan pariwisata di Kampung Namatota. Pemilihan ini didasarkan pada peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai instansi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata di Kampung Namatota.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Namatota'**

Pendekatan Collaborative Governance dalam pengembangan pariwisata di Kampung Namatota melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, LSM, komunitas lokal, dan pelaku usaha. Model ini mengacu pada kerangka kerja dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat elemen utama: kondisi awal, fasilitasi dan kepemimpinan, desain kelembagaan, serta proses kolaboratif. Pengembangan pariwisata di Kampung Namatota difokuskan pada pelestarian lingkungan dan penguatan budaya lokal melalui sinergi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana, LSM Sinara, serta masyarakat setempat. Sinergi ini mencakup peningkatan kapasitas masyarakat, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengelolaan atraksi wisata berbasis alam dan budaya seperti homestay, atraksi budaya, dan pelestarian tradisi lokal seperti Sasi Nggama. Meskipun kolaborasi telah terjalin, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, dan minimnya promosi masih menjadi hambatan. Namun, keberhasilan kolaborasi ini telah menunjukkan hasil yang positif, seperti diakuinya Kampung Namatota sebagai salah satu desa wisata berkembang nasional melalui ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024.

##### **1. Kondisi Awal**

###### **a. Kepercayaan Antar Pihak**

Kerja sama dalam pengembangan pariwisata di Namatota ditopang oleh tingkat kepercayaan yang tinggi antar pihak. LSM Sinara dipilih sebagai mitra strategis karena memiliki rekam jejak dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dan Pokdarwis dalam pelatihan serta pendampingan yang difasilitasi oleh Sinara berkontribusi pada peningkatan kapasitas lokal dalam mengelola wisata. Hal ini terbukti dari keberhasilan Kampung Namatota menembus 50 besar ADWI 2024 dan meraih peringkat kedua dalam kategori "Desa Berkembang".

### **b. Ketergantungan Sumber Daya**

Keterbatasan sumber daya, terutama pada jumlah staf dan kapasitas pendanaan pemerintah daerah, mendorong perlunya kolaborasi dengan pihak lain seperti LSM. Dukungan dana dari APBD Kabupaten Kaimana senilai Rp558.410.000,- digunakan untuk pembiayaan kegiatan pelatihan dan pendampingan masyarakat. LSM Sinara memainkan peran penting dalam mengisi celah teknis dan sumber daya manusia, khususnya dalam pelatihan bahasa Inggris, pengelolaan homestay, serta konservasi lingkungan.

### **c. Konflik Sebelumnya**

Tidak ditemukan konflik berarti dalam kerja sama ini. Proses kolaborasi berlangsung secara harmonis dengan partisipasi aktif semua pihak. Masyarakat dan Pokdarwis menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengelola potensi wisata lokal secara mandiri. Keberhasilan ini turut dibuktikan dengan kunjungan resmi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2021 serta partisipasi Kampung Namatota dalam ajang nasional ADWI.

## **2. Desain kelembagaan**

Desain kelembagaan dalam pengembangan pariwisata di Kampung Namatota mencerminkan pengaturan peran, mekanisme kerja sama, dan struktur formal yang mendukung keterlibatan berbagai pihak. Desain ini menjadi landasan bagi keberlangsungan kerja sama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata secara kolaboratif.

### **a. Struktur Kelembagaan**

Pengembangan kelembagaan di Kampung Namatota dimulai dengan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai organisasi utama yang mengelola kegiatan pariwisata. Kelompok ini dibentuk secara resmi melalui Surat Keputusan Kepala Kampung Namatota dan bertugas mengidentifikasi serta mengelola potensi wisata lokal, menyiapkan sumber daya, serta bertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pariwisata di kampung. Struktur organisasi Pokdarwis didesain untuk memfasilitasi kerja tim secara fungsional, melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan pelaku usaha lokal. Selain itu, adanya kesepakatan formal berupa Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana dengan LSM Sinara menunjukkan bentuk dukungan kelembagaan terhadap penguatan kapasitas masyarakat. Kerja sama ini menghasilkan berbagai program pelatihan seperti pengelolaan homestay dan transplantasi karang, yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknis masyarakat dalam pengelolaan wisata. Meskipun sudah menunjukkan kemajuan, masyarakat masih membutuhkan bimbingan dalam aspek manajemen, promosi, dan pelayanan wisatawan agar destinasi wisata dapat berkembang lebih optimal.

### **b. Proses Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan dalam pengembangan pariwisata Kampung Namatota dilakukan secara bertahap dan bersifat kolaboratif. Evaluasi kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan secara berkala oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama LSM Sinara, dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah pengembangan selanjutnya. Proses ini telah mendorong penguatan kapasitas Pokdarwis dalam menghadapi penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Beberapa kategori penilaian yang dipersiapkan meliputi daya tarik wisata, amenitas, digitalisasi, kelembagaan dan SDM, serta ketahanan destinasi. Pelaksanaan pelatihan seperti pengelolaan homestay dan konservasi lingkungan dikemas secara terpadu untuk mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap konsep desa wisata berkelanjutan. Namun, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi masih perlu ditingkatkan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian warga, khususnya generasi muda, merasa belum dilibatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam penetapan status kampung sebagai desa wisata. Hal ini menunjukkan



perlunya peningkatan transparansi, konsultasi publik, dan penguatan mekanisme partisipatif yang lebih inklusif agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi lokal.

### **3. Kepemimpinan Fasilitatif**

Kepemimpinan fasilitatif dalam konteks pengembangan pariwisata di Kampung Namatota menunjukkan bagaimana peran para pemimpin mampu mendorong kolaborasi lintas sektor, memperkuat komunikasi, serta menciptakan iklim yang mendukung partisipasi berbagai pihak. Kepemimpinan ini tidak hanya terletak pada satu individu atau lembaga, melainkan terbagi ke dalam beberapa peran kunci yang saling melengkapi.

#### **a. Peran Pemimpin**

Dalam pengembangan pariwisata Kampung Namatota, kepala dinas kebudayaan dan pariwisata berperan sebagai pengarah strategis yang memastikan sinergi kebijakan dengan potensi lokal. Di sisi lain, LSM Sinara memainkan peran pendamping yang intensif, khususnya dalam aspek pelatihan, edukasi, dan penguatan kapasitas masyarakat. Pokdarwis Namatota menjadi pelaksana utama yang menangani operasional kegiatan wisata secara langsung di lapangan. Ketiga aktor ini membentuk sistem kolaboratif yang saling berinteraksi secara fungsional. Kepala dinas merumuskan arah kebijakan dan melakukan supervisi, sementara tim teknis di lapangan melaksanakan koordinasi harian. LSM Sinara menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus penyedia materi edukasi. Pokdarwis bertanggung jawab pada implementasi kegiatan, pelayanan wisatawan, serta pelestarian lingkungan dan nilai budaya lokal. Kegiatan seperti keterlibatan dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara pemimpin formal dan komunitas dapat mengangkat potensi desa ke tingkat nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan dalam promosi pariwisata berbanding lurus dengan kesiapan aktor lokal dalam menyampaikan informasi, menjaga kualitas destinasi, dan membangun jejaring.

#### **b. Pemimpin sebagai Penggerak**

Pemimpin sebagai penggerak memiliki peran penting dalam menjaga semangat kerja sama antar pemangku kepentingan serta memastikan kesinambungan kebijakan dan program. Pemerintah daerah dalam hal ini tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai motor penggerak utama yang menjaga agar pencapaian dalam pengembangan pariwisata tetap menjadi bagian dari keberhasilan pemerintah daerah itu sendiri. Walaupun dukungan dari mitra seperti LSM Sinara sangat signifikan, pemerintah Kabupaten Kaimana tetap menjaga agar program-program yang dijalankan berdampak langsung bagi masyarakat. Pendekatan ini memperkuat legitimasi pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pembangunan daerah, sekaligus memastikan bahwa manfaat pembangunan pariwisata dapat dirasakan secara luas. Namun demikian, keberhasilan ini tetap membutuhkan konsistensi dalam bentuk dukungan kebijakan, pendanaan, dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal agar program tidak berhenti pada inisiatif jangka pendek. Kepemimpinan yang berkelanjutan dan adaptif sangat diperlukan untuk menjaga agar proses pengembangan desa wisata terus bergerak maju dan mampu menghadapi tantangan baru di masa mendatang.

### **4. Proses Kolaborasi**

Proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata di Kampung Namatota menunjukkan pentingnya interaksi, komunikasi, serta mekanisme kerja sama antar aktor yang terlibat. Ketiga aspek ini tidak hanya membentuk kerangka koordinasi, tetapi juga menentukan keberhasilan implementasi program berbasis kolaboratif di tingkat lokal.

#### **a. Dialog Tatap Muka**

Dialog tatap muka menjadi salah satu fondasi penting dalam menjamin kelancaran koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pariwisata. Meskipun teknologi digital seperti grup WhatsApp dan Messenger menjadi sarana komunikasi utama antar anggota Pokdarwis dan LSM Sinara, komunikasi langsung melalui kunjungan lapangan dan pertemuan berkala tetap dilakukan secara rutin. Kombinasi antara komunikasi daring dan tatap muka ini menunjukkan fleksibilitas dalam mekanisme kolaborasi, serta memastikan keterhubungan dan akuntabilitas antar pihak tetap terjaga. Dialog yang intensif ini tidak hanya memudahkan proses pertukaran informasi, tetapi juga menjadi sarana pengambilan keputusan secara partisipatif.

**b. Trust Building**

Kepercayaan antar pihak menjadi unsur penting dalam menjaga stabilitas kolaborasi jangka panjang. Keterlibatan LSM Sinara dalam mendampingi dan mempromosikan Kampung Namatota ke tingkat nasional menunjukkan adanya kepercayaan yang kuat antara masyarakat lokal, organisasi pendamping, dan pemerintah daerah. Hasil nyata dari proses ini, seperti keberhasilan Namatota masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia serta peningkatan fasilitas infrastruktur (menara telekomunikasi, listrik, dan air bersih), memperkuat keyakinan masyarakat akan dampak positif dari kerja sama lintas sektor. Trust building terbukti menjadi landasan yang memungkinkan terjadinya mobilisasi sumber daya dari luar serta penerimaan masyarakat terhadap intervensi pembangunan.

**c. Komitmen Bersama**

Komitmen bersama merupakan wujud nyata dari kesepahaman para aktor dalam mencapai tujuan pembangunan pariwisata. Kegiatan rutin seperti pembersihan kampung dan penyusunan paket wisata menjadi bukti konkret adanya kesadaran kolektif dalam menjaga kualitas destinasi dan meningkatkan daya tarik bagi wisatawan. Aktivitas tersebut tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial, tetapi juga menunjukkan integrasi nilai-nilai budaya dan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan dalam praktik kepariwisataan. Komitmen ini menjadi salah satu indikator keberhasilan kolaborasi karena mendorong konsistensi dan kontinuitas program yang telah direncanakan.

**3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Collaborative Governance di Kampung Namatota**

**1. Faktor Pendukung**

**a. Kepercayaan Antar Pemangku Kepentingan**

Kepercayaan antara pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan LSM menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan *collaborative governance* di Kampung Namatota. Kepercayaan ini memperkuat koordinasi dan komunikasi antarpihak, serta memfasilitasi terciptanya kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dalam pengembangan sektor pariwisata. Hubungan yang terbina berdasarkan saling percaya memungkinkan setiap pihak untuk mengambil peran secara aktif dalam proses pengambilan keputusan maupun implementasi program.

**b. Peran LSM Sinara dalam Penguatan Kapasitas Masyarakat**

LSM Sinara berperan strategis dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui berbagai pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Program pelatihan yang diberikan meliputi pengelolaan homestay, pelatihan kerajinan tangan, pelatihan menjadi pemandu wisata, serta penggunaan media sosial sebagai sarana promosi. Selain itu, LSM ini juga memberikan pendampingan langsung dalam kegiatan kepariwisataan, baik dalam kegiatan harian maupun dalam momen khusus seperti kunjungan pejabat dan partisipasi dalam kompetisi desa wisata. Agenda pelatihan yang disusun dalam



Kerangka Acuan Kerja (KAK) tahun 2024 meliputi berbagai materi penting, seperti pengantar identifikasi daya tarik wisata, manajemen perjalanan wisata, pengelolaan kampung wisata, identifikasi kuliner dan kerajinan lokal, hingga pasar pariwisata berkelanjutan. Materi tersebut dirancang untuk memperkuat kesiapan masyarakat dalam menghadapi dinamika pengelolaan pariwisata secara profesional. Dampak dari pelatihan ini tercermin dalam meningkatnya kualitas layanan pariwisata lokal, termasuk pengelolaan homestay yang lebih baik, kemampuan masyarakat dalam memandu wisatawan, serta kemampuan promosi destinasi secara digital. Hal ini juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap sektor pariwisata, menjadikan mereka sebagai aktor utama dalam pengembangan destinasi.

**c. Potensi Wisata yang Menarik**

Kampung Namatota memiliki potensi wisata yang tinggi, baik dari segi keindahan alam maupun kekayaan budaya. Destinasi seperti aktivitas snorkeling/diving bersama hiu paus dan lumba-lumba, Danau Ubur-ubur, Sunset Point, dan Babanus House Reef menjadi daya tarik utama yang belum banyak dimiliki oleh daerah lain. Di sisi budaya, terdapat tradisi seperti “Sasi Nggama” dan tradisi pemakaman raja dalam satu liang lahat, yang memiliki nilai historis dan kearifan lokal yang tinggi. Keberadaan spot wisata buatan seperti Sky View dan jembatan seratus juga turut menambah variasi atraksi wisata yang dapat ditawarkan kepada pengunjung. Kombinasi antara wisata alam, budaya, dan buatan ini menjadi kekuatan tersendiri dalam pengembangan destinasi berbasis komunitas. Potensi tersebut perlu dikelola secara optimal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal.

**2. Faktor Penghambat**

**a. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata**

Meskipun pengelolaan wisata di Kampung Namatota berbasis komunitas, tidak semua masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan pariwisata. Rendahnya kesadaran lingkungan di masa lalu, seperti kebiasaan membuang sampah ke laut, menjadi cerminan bahwa upaya penyadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan. Meskipun telah ada kemajuan, penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan wisata harus terus didorong agar pariwisata yang dikembangkan benar-benar berkelanjutan dan inklusif.

**b. Keterbatasan Pelatihan dan Pengembangan SDM**

Keterbatasan pelatihan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan penginapan, pemanduan wisata, dan kemampuan berbahasa asing (seperti bahasa Inggris), menjadi hambatan dalam peningkatan standar pelayanan pariwisata. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam menciptakan pengalaman wisata yang memuaskan. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar masyarakat mampu bersaing dan melayani wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara, secara profesional.

**c. Sulitnya Mengumpulkan Anggota Pokdarwis**

Kegiatan pembinaan dan koordinasi kelompok sadar wisata (Pokdarwis) seringkali terkendala oleh sulitnya mengumpulkan anggota, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Aktivitas melaut yang padat dan tidak menentu menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dalam pertemuan atau pelatihan. Hal ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan program-program kolaboratif. Dibutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, misalnya dengan menjadwalkan pertemuan sesuai waktu luang anggota atau memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh.

### 3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Studi Nurnawati et al. (2024) mengenai pelaksanaan *Collaborative Governance* di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada peran aktor utama, dukungan teknologi, dan penguatan kapasitas SDM. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini di Kampung Namatota, dimana kepercayaan antara masyarakat, LSM Sinara, dan pemerintah daerah memperkuat sinergi kolaboratif serta kapasitas SDM menjadi aspek krusial. Namun, penelitian ini juga menemukan kendala berupa pelatihan SDM yang belum menyentuh aspek bahasa dan pelayanan, serta kesulitan dalam pengorganisasian anggota Pokdarwis, yang belum secara eksplisit dibahas dalam konteks MPP. Sementara itu, Jamal dan Stronza (2009) menekankan kompleksitas kolaborasi di kawasan konservasi yang melibatkan masyarakat lokal dan sistem pemerintahan taman nasional, dengan kebutuhan integrasi pengetahuan lokal dan ilmiah. Penelitian ini mengonfirmasi hal tersebut dengan menggambarkan dinamika multi-aktor di tingkat komunitas yang harus diseimbangkan untuk mencapai pembangunan ekonomi sekaligus konservasi budaya. Okazaki (2008) juga relevan dalam menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dan redistribusi kekuasaan, yang menjadi tantangan dalam penelitian ini karena partisipasi masyarakat belum optimal dan perlu strategi peningkatan kapasitas. Reed (1997) mengingatkan bahwa relasi kekuasaan yang timpang sering menghambat kolaborasi, suatu fenomena yang juga muncul di penelitian ini dimana LSM dan pemerintah daerah memegang posisi sentral sehingga pengelolaan kekuasaan harus dilakukan secara transparan dan inklusif agar kolaborasi efektif dan berkelanjutan. Kondisi pandemi yang dibahas oleh Jamal & Budke (2020) memberikan konteks tambahan bahwa kolaborasi harus adaptif terhadap perubahan eksternal, termasuk yang memengaruhi kapasitas SDM dan pelatihan, seperti yang juga ditemukan dalam penelitian ini. Komppula (2014) menyoroti peran wirausahawan lokal dalam meningkatkan daya saing destinasi, yang menguatkan temuan penelitian ini bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada pemerintah dan LSM, tapi juga harus melibatkan pelaku usaha lokal secara aktif dan inovatif. Jovicic (2019) memperkenalkan konsep smart tourism destinations yang mengandalkan teknologi digital untuk memperkuat kolaborasi, sebuah potensi yang belum banyak disentuh dalam penelitian ini tetapi menjadi arah pengembangan yang potensial untuk mengatasi kendala pelatihan dan komunikasi. Wondirad et al. (2020) menunjukkan pentingnya kolaborasi stakeholder untuk ekowisata berkelanjutan, dengan penekanan pada komunikasi efektif dan partisipasi komunitas. Hal ini sangat relevan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan hambatan keterbatasan pelatihan dan partisipasi yang dapat menghambat keberlanjutan ekowisata. Landorf (2009) menggarisbawahi perlunya perencanaan jangka panjang dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan situs warisan budaya, sejalan dengan upaya LSM Sinara dalam pendampingan intensif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal sebagai modal utama keberlanjutan pariwisata berbasis komunitas. Dalam konteks aliansi pemasaran destinasi, Palmer & Bejou (1995) menegaskan bahwa strategi kolaboratif harus disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik lokal, yang mendukung temuan penelitian ini bahwa penguatan kolaborasi pemasaran antara pemerintah, LSM, dan komunitas sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi alam dan budaya unik di Kampung Namatota. Akhirnya, Volgger & Pechlaner (2014) menekankan pentingnya Destination Management Organizations (DMOs) dalam membangun jaringan dan otoritas kolaboratif yang efektif, yang menguatkan peran LSM dan pemerintah sebagai “jaringan pengelola” yang harus ditingkatkan kapabilitasnya agar kolaborasi berkelanjutan dan destinasi pariwisata tumbuh kompetitif. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memiliki banyak kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu terkait pentingnya peran aktor kunci, penguatan kapasitas, partisipasi masyarakat, dan adaptasi terhadap konteks lokal dalam *collaborative governance*. Perbedaannya lebih pada fokus konteks operasional dan tantangan spesifik yang muncul, seperti kendala pelatihan SDM, partisipasi Pokdarwis, dan aspek bahasa yang menjadi hambatan praktis di tingkat komunitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan-temuan sebelumnya



tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan spesifik yang perlu diatasi agar kolaborasi dapat lebih efektif dan berkelanjutan di konteks pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Kampung Namatota.

### 3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain faktor kepercayaan dan peran aktor kunci, penelitian ini membuka beberapa topik menarik yang relevan untuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan governance kolaboratif. Pertama, pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Mengingat temuan Jovicic (2019) tentang smart tourism destinations, integrasi teknologi dapat memperkuat transparansi, akses informasi, serta inovasi layanan yang berkelanjutan. Kedua, dilema hubungan kekuasaan dalam kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat yang sering kali mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Seperti diuraikan Reed (1997), pengelolaan relasi kekuasaan harus bersifat inklusif agar kolaborasi tidak didominasi oleh kelompok tertentu dan memunculkan konflik kepentingan. Ketiga, peran entrepreneur lokal sebagai agen perubahan yang mampu meningkatkan daya saing destinasi menjadi isu krusial. Sebagaimana Komppula (2014) temukan, penguatan peran wirausahawan kecil dapat mendorong nilai ekonomi sekaligus memperkuat kemandirian komunitas. Terakhir, penelitian ini juga mengungkap tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam hal pelatihan bahasa dan pelayanan, yang berdampak pada kualitas layanan pariwisata berbasis komunitas. Hal ini menjadi perhatian penting agar masyarakat tidak hanya menjadi pelaku pasif, melainkan juga profesional dalam pengelolaan destinasi.

## IV. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan collaborative governance dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas sangat bergantung pada kepercayaan dan peran strategis aktor kunci seperti LSM Sinara dan pemerintah daerah. Pendampingan dan pelatihan intensif terbukti meningkatkan kapasitas masyarakat, meskipun keterbatasan dalam pelatihan SDM dan pengorganisasian komunitas masih menjadi hambatan utama. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menekankan perlunya dukungan teknologi, pengelolaan relasi kekuasaan yang adil, serta penguatan peran pelaku lokal dan jaringan pengelola destinasi (DMO) sebagai faktor pendukung keberlanjutan dan daya saing destinasi. Dengan demikian, pengembangan pariwisata berbasis komunitas membutuhkan pendekatan yang holistik dan adaptif, mengintegrasikan aspek sosial, teknis, dan struktural dalam membangun kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan. Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, cakupan penelitian yang fokus pada satu daerah dengan aktor kunci terbatas mungkin mengurangi generalisasi temuan ke konteks lain yang lebih luas. Kedua, aspek penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan kolaborasi dan pariwisata belum dieksplorasi secara mendalam, padahal hal ini semakin penting di era smart tourism. Ketiga, keterbatasan data kualitatif terkait dampak jangka panjang pelatihan dan pendampingan terhadap keberlanjutan komunitas wisata masih kurang, sehingga perlu pengukuran dan evaluasi berkelanjutan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. Terakhir, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam dinamika kekuasaan dan konflik internal dalam komunitas, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas kolaborasi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, cakupan penelitian yang fokus pada satu daerah dengan aktor kunci terbatas mungkin mengurangi generalisasi temuan ke konteks lain yang lebih luas. Kedua, aspek penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan kolaborasi dan pariwisata belum dieksplorasi secara mendalam, padahal hal ini semakin penting di era smart tourism. Ketiga, keterbatasan data kualitatif terkait dampak jangka panjang

pelatihan dan pendampingan terhadap keberlanjutan komunitas wisata masih kurang, sehingga perlu pengukuran dan evaluasi berkelanjutan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. Terakhir, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam dinamika kekuasaan dan konflik internal dalam komunitas, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas kolaborasi.

**Arah Penelitian Masa Depan (*Future Work*).** Penelitian ini membuka berbagai peluang pengembangan kajian lebih lanjut yang dapat memperkaya pemahaman dan praktik pengelolaan pariwisata berbasis komunitas dengan pendekatan *collaborative governance*. Salah satu arah penting adalah eksplorasi lebih mendalam mengenai pemanfaatan teknologi digital dan konsep *smart tourism* dalam memperkuat koordinasi serta komunikasi antar pemangku kepentingan. Mengingat perkembangan pesat teknologi informasi, integrasi solusi digital dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan transparansi, akses informasi, dan inovasi layanan, sehingga mendukung pengelolaan destinasi yang lebih responsif dan berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian komparatif di berbagai daerah dengan konteks sosial budaya yang berbeda akan memberikan wawasan penting terkait faktor keberhasilan atau hambatan dalam penerapan *governance* kolaboratif. Pendekatan multi-lokasi ini memungkinkan generalisasi temuan yang lebih luas dan adaptasi strategi pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang sesuai dengan karakteristik lokal. Selain itu, studi longitudinal sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari pelatihan dan pendampingan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesinambungan pengelolaan komunitas wisata. Monitoring berkelanjutan dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat keberlanjutan kolaborasi dan kualitas layanan pariwisata. Arah penelitian berikutnya adalah analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika kekuasaan dan konflik internal dalam komunitas pariwisata. Memahami bagaimana hubungan kekuasaan mempengaruhi proses kolaborasi sangat penting untuk merumuskan mekanisme pengelolaan yang inklusif dan efektif, sehingga semua pihak merasa diakomodasi dan terlibat secara aktif. Terakhir, peran wirausahawan lokal sebagai agen perubahan sosial-ekonomi juga perlu menjadi fokus kajian, terutama dalam konteks penguatan daya saing destinasi. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana inovasi sosial dan kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat kemandirian komunitas dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Dengan demikian, arah penelitian masa depan hendaknya berorientasi pada integrasi aspek teknologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan agar pengembangan pariwisata komunitas dapat berjalan secara holistik, adaptif, dan berkelanjutan.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta jajaran telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Aas, C., Ladkin, A., & Fletcher, J. (2005). Stakeholder collaboration and heritage management. *Annals of Tourism Research*, 32(1), 28–48. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.04.005>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bramwell, B., & Sharman, A. (1999). Collaboration in local tourism policymaking. *Annals of Tourism Research*, 26(2), 392–415. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(98\)00105-4](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00105-4)



- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Healey, P. (2003). Collaborative Planning in Perspective. *Planning Theory*, 2(2), 101–123. <https://doi.org/10.1177/14730952030022002>
- Jamal, T. B., & Getz, D. (1995). Collaboration theory and community tourism planning. *Annals of Tourism Research*, 22(1), 186–204. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(94\)00067-3](https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00067-3)
- Jamal, T., & Budke, C. (2020). Tourism in a world with pandemics: local-global responsibility and action. *Journal of Tourism Futures*, 6(2), 181–188. <https://doi.org/10.1108/JTF-02-2020-0014>
- Jamal, T., & Stronza, A. (2009). Collaboration theory and tourism practice in protected areas: stakeholders, structuring and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 17(2), 169–189. <https://doi.org/10.1080/09669580802495741>
- Jovicic, D. Z. (2019). From the traditional understanding of tourism destination to the smart tourism destination. *Current Issues in Tourism*, 22(3), 276–282. <https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1313203>
- Komppula, R. (2014). The role of individual entrepreneurs in the development of competitiveness for a rural tourism destination – A case study. *Tourism Management*, 40, 361–371. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.07.007>
- Landorf, C. (2009). Managing for sustainable tourism: a review of six cultural World Heritage Sites. *Journal of Sustainable Tourism*, 17(1), 53–70. <https://doi.org/10.1080/09669580802159719>
- Novelli, M., Schmitz, B., & Spencer, T. (2006). Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience. *Tourism Management*, 27(6), 1141–1152. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.11.011>
- Nuridin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Nurnawati, E., Sabaruddin, S., & Nurrahman, A. (2024). Analisis Collaborative Governance pada Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh. *Jurnal Media Birokrasi*, 197–213. <https://doi.org/10.33701/jmb.v6i2.4832>
- Okazaki, E. (2008). A Community-Based Tourism Model: Its Conception and Use. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(5), 511–529. <https://doi.org/10.1080/09669580802159594>
- Palmer, A., & Bejou, D. (1995). Tourism destination marketing alliances. *Annals of Tourism Research*, 22(3), 616–629. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(95\)00010-4](https://doi.org/10.1016/0160-7383(95)00010-4)
- Reed, M. G. (1997). Power relations and community-based tourism planning. *Annals of Tourism Research*, 24(3), 566–591. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(97\)00023-6](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)00023-6)
- Sautter, E. T., & Leisen, B. (1999). Managing stakeholders a Tourism Planning Model. *Annals of Tourism Research*, 26(2), 312–328. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(98\)00097-8](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00097-8)
- Schimmelfennig, F., & Sedelmeier, U. (2004). Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of Central and Eastern Europe. *Journal of European Public Policy*, 11(4), 661–679. <https://doi.org/10.1080/1350176042000248089>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif* (Kedua). CV. ALfabeta.
- Statista. (2023). *Tourism revenue in Indonesia from 2013 to 2022*. Statista Research Department. <https://www.statista.com/statistics/1000794/indonesia-tourism-revenue/>
- Sundaramurthy, C., & Lewis, M. (2003). Control and Collaboration: Paradoxes of Governance. *The Academy of Management Review*, 28(3), 397. <https://doi.org/10.2307/30040729>
- Volgger, M., & Pechlaner, H. (2014). Requirements for destination management organizations in destination governance: Understanding DMO success. *Tourism Management*, 41, 64–75. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.09.001>

Wondirad, A., Tolkach, D., & King, B. (2020). Stakeholder collaboration as a major factor for sustainable ecotourism development in developing countries. *Tourism Management*, 78, 104024. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.104024>

